



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMAT DWISAPUTRA
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 271793

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	4.470.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.635.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.835.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	979.000.000
1. MOBIL, MERCEDES BENZ GLC 200 (X253) / JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000		
2. MOBIL, HONDA CIVIC RS TURBO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 499.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.610.319.076
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.059.319.076
III. HUTANG	Rp.	823.218.773
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.236.100.303

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.